

## ABSTRAK

Tindak pidana gratifikasi dianggap sebagai bagian dari tindakan korupsi yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi yang diatur di dalam Pasal 12B jo. Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, belum ada kejelasan tentang undang-undang yang mengatur bahwa gratifikasi/pemberian yang berasal dari konteks budaya. Hal ini kemudian memicu perdebatan tentang pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini, adanya kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pengaturan pemberian gratifikasi apabila dikaitkan dengan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, dan dibutuhkan rekonstruksi pengaturan gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat.

Agar permasalahan itu dapat diurai, maka diperlukan sebuah metode dalam penelitian seperti paradigma konstruktivisme, yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yang berlandaskan hukum doktrinal/normatif/positivisme. Sumber data kemudian digunakan dalam penelitian meliputi Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hasil wawancara dengan ahli budaya, tokoh penegak hukum dan tokoh agama yang berkaitan dengan rekonstruksi pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat, dan Observasi ke tempat-tempat atau institusi yang menjadi objek dari penelitian. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku/pustaka yang relevan dan literatur berupa karya ilmiah, hasil seminar, makalah, opini, surat kabar, majalah, dan jurnal keilmuan. Terakhir bahan hukum tersier antara lain kamus, ensiklopedia, dan internet.

Penelitian ini pada akhirnya menghasilkan rekonstruksi pengaturan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan yang bermartabat. Setidaknya terdapat enam komponen yang harus diperjelas, yakni pertama adalah pasal-pasal harus diubah dalam bentuk konkret dengan menyesuaikan perkembangan realitas budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kedua, untuk memangkas jiwa feodalisme yang membudaya, pemberatan hukuman harus diterapkan pada undang-undang tipikor khususnya bagi pemangku jabatan dan aparat penegak hukum yang terbukti menerima suap dan gratifikasi. Ketiga, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 harus mengatur secara khusus delik gratifikasi menurut bidangnya. Hal ini penting agar penanganan masalah gratifikasi memiliki nilai keadilan dan bermartabat. Keempat, Secara etika unsur pengecualian pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) harus ada pengecualian dengan penegasan bahwa pemberian hadiah yang tidak membengkokkan otoritas hal maka itu bukan tindak korupsi. Kelima, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 harus memuat jenis-jenis tindakan korupsi sebagai pembeda antara korupsi yang dilakukan secara kolosal (besar) dan yang kecil. Keenam, semangat pada pasal-pasal di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001, belum tampak diwarnai dengan ruh keagamaan.

**Kata Kunci: Gratifikasi, Rekonstruksi, Keadilan, Martabat, Tindak Pidana Korupsi**

### **ABSTRACT**

*Gratuities are considered as part of the Corruption Act set forth in Law No. 20 of 2001 on the eradication of corruption crimes referred to as criminal corruption of civil servants receiving the gratification set out in article 12B Jo. Article 12C Act No. 20 of 2001 on the eradication of corruption crimes. Nevertheless, there has been no clarity on the legislation governing the gratification/granting of the cultural context. This then triggered a debate about the gratuities in the current Corruption Eradication Act, the weaknesses arising in the arrangement of gratification when associated with a thriving culture in Indonesian society, and the need for reconstruction of a gratification arrangement in the Act of corruption eradication law based on the value of a dignified justice.*

*In order for the problem to be degraded, a method in research is needed such as the constructivism paradigm, normative juridical, with research specifications based on doctrinal/normative/positivism law. The data source is then used in the research covering the primary legal ingredient consisting of CONSTITUTION 1945, the Criminal Code of the Criminal Code Act, Law No. 20 of 2001 on corruption eradication, interviews with cultural experts, law enforcement figures and religious leaders related to the reconstruction of gratuity arrangements in a corruption crime based on a dignity of fairness value, and observations to the places or institutions that become objects of the research. Secondary legal material consisting of relevant books/libraries and literature in the form of scholarly works, seminar results, Papers, opinions, newspapers, magazines, and scholarly journals. The last material of tertiary law materials include dictionaries, encyclopedia, and Internet.*

*The research ultimately resulted in a reconstruction of the gratuity setting in a corruption crime based on the value of a dignified justice. There are at least six components that must be defined, i.e. the first are the chapters must be changed in concrete form by adjusting the development of cultural reality that occurs in the midst of society. Secondly, to trim the soul of cultural feudalism, punishment should be applied to the legal laws, especially for the regent and law enforcement officials who proved to accept bribery and gratification. Thirdly, law No. 20 of 2001 must arrange specifically for gratuities according to their field. It is important that the handling of gratification problems has a value of fairness and dignity. Fourth, ethically the element of exclusion on law No. 20 of 2001 Article 12 C paragraph (1) there must be an exception with the assertion that the awarding of the prize does not bend the authority of the matter then it is not a corruption act. Fifth, the law No. 20 of 2001 must contain the kinds of corruption measures as a differentiator between the corruption committed in colossal (large) and small. Sixth, the spirit of the chapters in the law No. 20 of year 2001, has not yet appeared to be stained with the spirit of religion.*

**Keywords: Gratification, Reconstruction, Justice, Dignity, Corruption Crime**